



Mojokerto
Full of Maianahit Greatness

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
MOJOKERTO**





**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Jayanegara Nomor 4 Mojokerto, Kode Pos 61363 Jawa Timur

Telp. (0321) 322244, 394748 No. Fax. (0321) 392655

Website : <http://www.disparpora.mojokertokab.go.id>

Email : disparpora.mr@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/39/416-116/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERIODE 2025-2029, RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026, DAN
PERUBAHAN RENJA (P-RENJA) TAHUN 2025 PADA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra 2025-2029, dan P-Renja 2025 di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Renja Tahun 2026, dan P-Renja Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Renja Tahun 2026, dan P-Renja Tahun 2025 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah;
 2. Menelaah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 3. Menganalisis Gambaran Layanan Perangkat Daerah;
 4. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan;
 5. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi;
 6. Memverifikasi keselarasan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan; dan
 7. Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan termasuk melakukan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.
- Ketiga : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

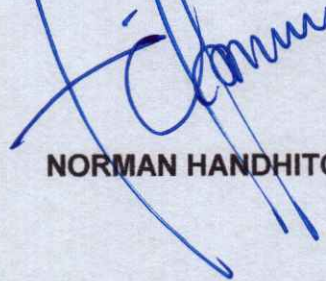
Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 27 Desember 2024

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO**



NORMAN HANDHITO

BAB I**PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah

Secara normatif penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto merupakan pembuatan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan guna memahami tuntutan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra PD Kabupaten Mojokerto sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto.

Pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-

Commented [B1]: Ta,bahkan Daerah (RPJPD)

2029. Pola pembangunan bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau yang akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang. Evaluasi terhadap pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan yang telah dilaksanakan melalui berbagai tanggapan, kritik dan saran merupakan input dalam perumusan isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang selanjutnya akan dirumuskan dalam peta pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan serta kepemudaan dan keolahragaan jangka menengah di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025- 2029

Dalam bidang kebudayaan, secara umum pembangunan kebudayaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Keragaman budaya perlu diangkat kembali melalui reinterpretasi, reposisi dan penerimaan kembali kearifan-kearifan kreatif lokal dalam menunjang sosok kebudayaan nasional
- (2) Mengembangkan modal sosial yang mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan
- (3) Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri
- (4) Pemberdayaan model-model budaya lokal kearah pencapaian kondisi jati diri, menimbulkan kepercayaan diri untuk membuka dialog atau kontak budaya dalam keragaman, sehingga dapat dicapai saling pengertian, saling menghargai, tidak saja untuk menghindari konflik dan kekerasan, tapi juga memotivasi diri bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.
- (5) Atas perintah UUD 1945 Pasal 32, yaitu Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, maka perlu adanya politik laten kebijakankebudayaan yang menempatkan kebudayaan dalam kodratnya sebagai upaya masyarakat dalam menjawab tantangan hidup yang dihadapinya.
- (6) Supaya kebudayaan Indonesia tampil berperan secara strategis dalam upaya membebaskan bangsa ini dari kemelut krisis multi dimensi, maka perlu adanyakemauan politik pemerintah serta komitmen seluruh masyarakat untuk menjadikan kebudayaan sebagai gerakan nasional.

Pendahuluan **BAB I**

Dalam bidang pariwisata, secara umum pembangunan diarahkan pada pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas. Dengan konteks semacam ini pengembangan pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan penjualan dan pemasaran produk masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memelihara kepentingan bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan di bidang kepemudaan diposisikan agar pemuda Indonesia mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan (bangsa), sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermaksud sebagai spirit kepeloporan, kreatifitas dan kepedulian pemuda. Dengan spirit ini, pemuda tidak hanya mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional, namun juga sekaligus menjadi *solution maker* bagi permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri.

Kebijakan bidang keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial dan kesejahteraan individu dan kelompok.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia diperlukan pembaharuan RENCANA STRATEGIS Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 rencana strategis yang disajikan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2029.

Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, Renstra ini berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Dokumen Renstra ini disusun sesuai dengan tahapan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 25. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang
 26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 27. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri LHK Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

- tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. [Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021](#) Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
 37. Permendikbudriste no 6 tahun 2023 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 39. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
 40. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 43. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang gender di Kabupaten Mojokerto;
 44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun

2018-2033;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
47. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang RPJPD Kab Mojokerto 2025 -2045;
48. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan agar semua program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pejabat struktural, instalasi, serta semua unit kerja fungsional dalam Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025- 2029 mengacu pada Perencanaan Strategis yang dicantumkan dalam Dokumen Renstra ini. Selain itu maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah dalam rangka menjabarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 ke dalam perencanaan instansional sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan OPD;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

4. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja; dan
5. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Memuat tugas, fungsi dan struktur PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Sumber daya PD, Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) dan Kelompok sasaran layanan (Bappeda, kelompok sasaran layanannya)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat Permasalahan PD dan Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan paling sedikit memuat Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan paling sedikit memuat uraian Program; uraian Kegiatan; uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Disparpora memiliki 2 (dua) kewenangan/ urusan yakni urusan wajib pada bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan dan urusan pilihan pada bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Disparpora Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

Disbudporapar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Disbudporapar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Disbudporapar membawahi sebagai berikut:

- a. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b) Fungsional Perencana
 - c) Fungsional Analisis Keuangan
- b. Bidang Kepemudaan terdiri atas:
 - a) Fungsional Pemberdayaan Masyarakat
- c. Bidang Olahraga terdiri atas:
 - a) Fungsional Pelatih Olahraga
- d. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
 - a) Fungsional Pamong Budaya
- e. Bidang Pariwisata terdiri atas:
 - a) Fungsional Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 93 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN,
 KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN MOJOKERTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**



BUPATI MOJOKERTO,

 IKFINA FAHMAWATI
 Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows

Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi Disbudporapar

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

b) Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d) pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumah-tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;

- d. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - e. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- c) Bidang Pariwisata
- 1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata meliputi daya tarik wisata, promosi wisata serta jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata, promosi wisata, serta jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi/pertimbangan pemberian izin dibidang obyek wisata dan usaha pariwisata;
 - c. pelaksanaan pemantauan daya tarik wisata, promosi wisata serta jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - f. melakukan penerapan branding pariwisata dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten;
 - g. melakukan perintisan objek dan kegiatan wisata;
 - h. melakukan pembinaan promosi pariwisata tingkat kabupaten;
 - i. melakukan kerjasama dibidang pariwisata;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan promosi, informasi wisata dan bimbingan wisata;
 - k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- b. perumusan pedoman olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga pendidikan;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan, pembibitan, festival, lomba serta kompetisi olahraga;
 - d. pelaksanaan pengiriman olahragawan pada festival, lomba dan kejuaraan olahraga;
 - e. pelaksanaan koordinasi antar lembaga keolahragaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f) Bidang Kebudayaan
- 1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata meliputi pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat serta kesejarahan dan keurbakalaan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kebudayaan, kesenian rakyat dan kesejarahan keurbakalaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan ketahanan budaya daerah dan nasional;
 - c. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi/ pertimbangan pemberian izin dibidang kesenian rakyat;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

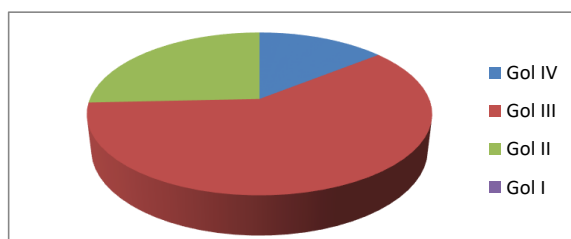
Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Disbudporapar Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya maupun aparatur sebanyak 168 orang terdiri dari 35 orang PNS dan 133 orang tenaga kontrak.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Disbudporapar Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan didominasi oleh tingkat Strata satu sebanyak 14 orang, tingkat Strata dua sebanyak 8 orang, , Diploma III sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 8 orang, dan SLTP sebanyak 1 orang. Sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh golongan III sebanyak 21 orang, golongan II sebanyak 9 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang. Secara detil kondisi SDM dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut :

Gambar 2.1. Kondisi SDM Disbudporapar



Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.1
Jumlah PNS berdasarkan
Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Pendidikan								TOT AL
		S3	S2	S1	D- IV	D- III	SMA	SMP	SD	
1	IV/b	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2	IV/a	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Total Gol IV		-	5	-	-	-	-	-	-	5
3	III/d	-	3	4	-	-	-	-	-	7
4	III/c	-	-	2	-	-	-	-	-	2
5	III/b	-	-	4	-	2	2	-	-	8
6	III/a	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Total Gol III		-	3	14	-	2	2	-	-	21
7	II/d	-	-	-	-	-	6	-	-	6
8	II/c	-	-	-	-	2	-	-	-	2
9	II/b	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gol II		-	-	-	-	2	6	1	-	9
11	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gol I		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total										35

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan
Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1	Laki-laki	19	107	130
2	Perempuan	16	26	43
TOTAL		35	133	173

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.3
Jumlah PNS berdasarkan Distribusi
pada Bidang dan Sekretariat

NO	BIDANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sekretariat	4	7	11
2	Kepemudaan	2	2	4
3	Olahraga	3	2	5
4	Kebudayaan	2	1	3
5	Pariwisata	8	4	12
Total		19	16	35

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

2.2.2. Aset/Modal

Kantor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto terletak di Jl. Jayanegara Nomor 4 Mojokerto. Prasarana dan sarana perkantoran yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto antara lain bangunan gedung kantor di atas tanah seluas 3.725 meter persegi. Selain itu, terdapat juga asset/modal berupa jumlah unit gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Data asset/modal

No	Jenis Bangunan	Jumlah Luas (m ²)
1	Tanah Pemandian Ubalan	10.292
2	Tanah parkir wisata Ubalan	1.680
3	GOR Indoor	12.125
4	Stadion Gajah Mada	47.550
5.	Gedung Kesenian	753

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengampu 3 urusan yaitu urusan pemuda dan olahraga, urusan pariwisata, dan urusan kebudayaan. Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peranserta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Keberhasilan bidang pemuda harus ditunjang dengan kualitas dan kuantitas organisasi pemuda, dengan banyaknya organisasi pemuda merupakan modal yang besar dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas organisasi pemuda.

Dalam ruang lingkup olahraga menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bertanggungjawab serta mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan dan atau atas kewenangannya diharuskan mengatur serta mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah meliputi :

- a. Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan sebagai proses pendidikan.
- b. Olahraga rekreasi yang diselenggarakan sebagai pemulihan kesehatan.
- c. Olahraga Prestasi yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas dan martabat bangsa.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati

diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan nilai tambah pajak, peningkatan pendapatan asli daerah serta dapat menumbuhkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, makanan. Analisis kinerja atas seni budaya dilakukan terhadap indikator – indikator jumlah group kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada focus seni budaya dan olahraga.

Tabel 2.3.1

Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019 - 2024

Capaian Pembangunan	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Mojokerto					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Group Kesenian	540	365	199	392	394	315
Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1
Jumlah Klub Olahraga	103	130	159	200	257	317
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2	2

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Kabupaten Mojokerto mempunyai potensi cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah group kesenian yang mengalami peningkatan. Peningkatan ini berkaitan dengan beragam jenis kegiatan seni dan budaya di masyarakat seperti wayang kulit, ludruk, kesenian melayu, campursari, kuda lumping, bantengan dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan berbagai festival seni dan budaya untuk menampung apresiasi masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap pelestarian budaya setempat. Selain bidang kesenian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mendukung pelaksanaan kegiatan olahraga. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya klub olahraga terus mengalami

peningkatan menjadi 317 klub olahraga dan dua bangunan gedung olahraga sebagai bentuk fasilitasi serta pelayanan pada bidang olahraga.

Tabel 2.3.2

Capaian Kinerja Olahraga dan Budaya Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019-2024

Capaian Kinerja Olahraga dan Budaya Kabupaten Mojokerto							
Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	buah	276	276	276	N/A	N/A	36
Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	buah	2	2	12	N/A	N/A	1
Kesenian Tradisional	jenis	540	365	34	22	22	315
Cagar Budaya	unit	46	46	46	20	120	-
Permuseu man	buah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kunjungan wisata	orang	1.949.519	832.343	477.291	991.340	2.000.622	2.143.513
Lama kunjungan Wisata	hari	1,40	1,40	N/A	N/A	N/A	N/A
PAD sektor pariwisata	rupiah	11.080.620.420	5.300.739.000	2.670.514.300	6.214.169.103	8.698.945.147	7.556.211.000
Jumlah Pemuda Prestasi	orang	-	1	-	-	1	7
Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	organisasi	11	12	12	12	12	12
Jumlah Atlit Prestasi	orang	58	10	20	15	453	485
Jumlah Cabor Prestasi	cabor	12	4	14	6	15	23
Penyelenggaraan even seni dan budaya	Kali	2	4	35	8	5	3
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	46	46	69	3	-	3
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	-	-	49	-	-	-
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		-	0	-	2	2	2

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Urusan Pemuda

Tabel 2.3.3

Capaian Kinerja Urusan Pemuda Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019-2024

Jenis Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BEM	7	7	9	9	9	9
OSIS	94	146	25	25	100	100
OKP Pemuda	12	12	12	12	13	13

Jumlah Kegiatan Kepemudaan							
Nama Kegiatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan / Pelatihan Organisasi Kepemudaan	giat	1	1	-	0	-	-
	orang	100	30	-	0	-	-
	lokasi	Pendopo Graha Maja Tama	Aula Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto	-	0	-	-
Penyuluhan narkoba	giat	1	1	-	1	-	-
	orang	100	50	-	80	-	-
	lokasi	Ruper Disparpora	Aula Gerakan Pramuka	-	Ruper DISBU DPOR APAR	-	-
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	giat	1	1	1	1	-	2
	orang	50	50	50	16	-	50
	lokasi	Wisata Desa Randu- genengan	Ubalan Waterpark	Aula Disbu dparpora	BLK Jabon	-	Royal Trawas Hotel
Seleksi PASKIBRAKA	giat	2	1	1	1	-	-
	orang	304	300	300	300	-	-
	lokasi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	Gor Mojosari dan Provinsi	-	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan	giat	1	1	1	1	-	-
	orang	50	50	50	80	-	-
	lokasi	Lesehan Pringgoda di Pacet	Aula Gerakan Pramuka Kwartir Cabang	Aula Disbu dparpora	Aula Disbud parpora	-	-

			Kab. Mojokerto				
Lomba Kreativitas Pemuda (Baris Berbaris)	giat	1	-	1	-	1	-
	orang	400	-	336	-	300	-
	lokasi	GOR Mojosari	-	GOR Mojosari	-	GOR Mojosari	-
Lomba pemuda Pelopor	giat	-	-	-	-	-	1
	orang	-	-	-	-	-	165
	lokasi	-	-	-	-	-	Disbudpora
Pembentukan Saka Pariwisata	giat	-	1	-	-	-	-
	orang	-	250	-	-	-	-
	lokasi	-	Gedung Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto	-	-	-	-
Jumlah	giat	7	5	4	4	1	3
	orang	1.004	480	736	736	300	215
	lokasi	6	6	2	2	1	2

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Urusan Olahraga

Perkembangan organisasi olahraga di Kabupaten Mojokerto meningkat dari tahun ke tahun, Organisasi Olah Raga di Kabupaten Mojokerto secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.4

Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2015-2020

Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto						
Nama Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Atletik	organisasi	4	5	10	10	10
Sepak Bola	organisasi	45	48	48	48	48
Bola Voli	organisasi	18	20	20	20	20
Bola Basket	organisasi	14	16	16	16	16
Bilyar	organisasi	5	6	6	6	6
Bulu Tangkis	organisasi	6	7	7	7	7
Tenis Lapangan	organisasi	5	6	6	6	6
Tenis Meja	organisasi	8	9	9	9	9
Catur	organisasi	7	8	9	9	9
Karate	organisasi	18	20	20	20	20
Wushu	organisasi	3	4	4	4	4
Kempo	organisasi	2	3	3	3	3

Silat	organisasi	16	18	18		18
Takraw	organisasi	4	5	5	5	5
Selam	organisasi	2	3	3	3	3
Senam	organisasi	1	2	3	3	3
Bina Raga	organisasi	6	7	-	1	1
Renang	organisasi	8	9	9	9	9
Gulat	organisasi	2	3	3	3	3
Yudo	organisasi	2	3	3	3	3
Bridge	organisasi	1	2	2	2	2
BPOC	organisasi	1	2	-	-	-
Hoki	organisasi	4	5	5	5	5
PanjatTebing	organisasi	2	3	3	3	3
Drumband	organisasi	75	78	78	78	78
Taekwondo	organisasi	7	8	8	8	8
Paralayang	organisasi	1	2	2	2	2
Bola Tangan	organisasi	1	2	3	3	3
Pentaque	organisasi	1	2	2	2	2
Olahraga Wanita	organisasi	1	2	2	2	2
Soft Ball	organisasi	2	3	3	3	3
Jujitsu	organisasi	2	3	3	3	3
Muythai	organisasi	2	3	3	3	3
Jumlah		276	317	316	299	317

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Urusan Kebudayaan

Kebudayaan sebagai salah satu indikator yang menentukan nilai keberagaman suatu daerah. Potensi Kabupaten Mojokerto cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu kesatuan di dalam pengembangan kesenian di Kabupaten Mojokerto, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat serta kreativitas seniman dan seniwati.

Tabel 2.3.5
Capaian Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019-2024

Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto							
Nama Kegiatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wayang Kulit	Organisasi	56	37	23	41	41	45
Ludruk	Organisasi	18	6	8	11	11	8
Orkes Melayu	Organisasi	220	115	65	145	145	137
Qosidah Modern	Organisasi	4	-	3	1	1	7

Campursari	Organisasi	47	20	25	46	46	48
Kuda Lumping	Organisasi	47	23	14	47	47	38
Bantengan	Organisasi	56	30	21	43	43	53
Pencak Silat	Organisasi	17	9	9	13	13	12
Sanggar Seni	Organisasi	5	7	4	5	5	8
Band	Organisasi	1	-	-	-	0	3
Elektone	Organisasi	44	18	15	25	25	25
Reog	Organisasi	4	1	1	4	4	2
Sholawat modern	Organisasi	4	-	1	-	0	n/a
Karawitan	Organisasi	9	4	4	7	9	8
Layar Tancap	Organisasi	-	-	-	-	0	n/a
MC	Organisasi	-	-	-	-	0	n/a
Waranggono	Organisasi	-	-	-	-	0	n/a
Event Organizer	Organisasi	-	-	1	-	0	n/a
Musik Humor	Organisasi	7	3	2	4	4	n/a
Rock dangdut	Organisasi	-	-	-	-	0	n/a
Pramuseni	Organisasi	1	-	1	-	0	n/a
Tradisional Kombang	Organisasi	-	-	-	-	0	n/a
Jumlah		540	273	197	392	394	394

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur:

- Festival Dalang Muda Jawa Timur mendapat penghargaan kategori “5 Penyaji Terbaik”
- Penyaji Terbaik Jatim Specta Night Carnival 2019 dengan Tema “*Jotundo Kidung Adni Amertama*” bertempat di Kabupaten Situbondo pada tanggal 19 Oktober 2019, diraih oleh Kabupaten o.l;Mojokerto;
- Penyaji Terbaik non ranking pentas di Anjungan Jawa Timur TMII “*Nyi Roro Kidul Mantu*” pada tanggal 3 November 2019, diraih oleh Kabupaten Mojokerto;
- Penyaji Unggulan Terbaik Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2019 dengan judul Aringgit bertempat di Gedung Kesenian Cak Durasim pada tanggal 1-3 Mei 2019, diraih oleh Kabupaten Mojokerto;
- Lima Dalang Bocah Terbaik Non Ranking Tingkat Propinsi Jawa Timur dalam rangka Parade Dalang Bocah se Jawa, diraih An. Johana Cleora Saskia;
- Juara 2 Paduan Suara dalam rangka Festival Seni Budaya Pelajar di Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019, diraih oleh SMAN 1 Sooko

Urusan Pariwisata

Sektor Pariwisata mempunyai potensi yang cukup besar jika dilihat dari segi letak dimana Kabupaten Mojokerto berada pada jalur poros *Gresik-Bangkalan-*

Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang Kerta susila), memberi peluang cukup besar untuk dijadikan destinasi wisata. Obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Mojokerto berada di 93 lokasi dan berdasarkan kategori jenis destinasi terbagi dalam beberapa jenis potensi wisata, yaitu wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religi, serta wisata belanja dan kuliner seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.6

Potensi Wisata Alam Kabupaten Mojokerto

Potensi Wisata berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Alam	
Potensi Wisata	Lokasi
Gunung Penanggungan	Trawas
Air Terjun Dlundung	
Air Terjun Desa Duyung	
Air Terjun Desa Kemendung	
Wisata Tubing Dlundung	
Wisata Hutan Pinus	
Camping area Dlundung	
Camping area Joloundo	
PPLH Seloliman	
Air Terjun Grenjengan	
Air Terjun Watu Gilang	
Gunung Pundak	Pacet
Gunung Welirang	
Air Terjun Coban Cangu	
Air Terjun Coban Surodadu	
Air Terjun Coban Waru	
Air Terjun Coban Watu ondo Kembar	
Air Terjun Coban watu	
Air Terjun Coban Curah watu	
Air Terjun Watu lumpang	
Wisata Rafting	
Air Terjun Grenjengan	
Air Terjun Watu Adem	
Air Terjun Desa Bulak kunci	
Spot foto desa sendi	
Wisata Hutan Pinus	
Bumi Perkemahan Claket	
Area camping Desa Nogosari	
Pemandian Air Panas	Jatirejo
Puncak Watu jengger	
Air Terjun Tujuh Bidadari	
Air Terjun Coban Kabejan	

Wisata akar seribu	Gondang
Tubing akar seribu	
Goa Selopayung	
Wisata Edukasi Lembah Mbencirang	Kemlagi
Ekowisata Tanjungan	
Wana Wisata Watu Blorok	

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.3.7

Potensi Wisata Kreasi Kabupaten Mojokerto

Potensi Wisata berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Kreasi	
Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
Duyung Trawas Hill	Trawas
Fresh Green	
Joglo Park	Pacet
Pacet Mini Park	
Wisata Ubalan	
Claket Adventure Park	
Pacet Hills	
Petik strawberry	
Taman Kelinci	Gondang
Pemandian Balekambang	
Lembah Bencirang	Sooko
Waterpark Sooko	Mojoanyar
Kolam renang rolak songo	
Kolam renang Tirta anandiri	Ngoro
Kolam renang MK Tirta	
D & N waterland	Mojosari
Kolam Renang BBB	Jatirejo
Dewa Jembul (Desa Wisata Jembul)	Dlanggu
Wisata Desa Randugenengan	
Wisata Petik Jeruk	Gedeg
MKP Brantas	

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.3.8
Potensi Wisata Edukasi dan Minat Khusus Kabupaten Mojokerto

Potensi Wisata berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Edukasi dan Minat Khusus	
Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
Kampung main Majapahit	Trowulan
Museum Majapahit	
Wisata Dayang Sumbi	Puri
PPLH Seloliman	Trawas
Kampung Organik Brenjonk	
Jalur Pendakian Puncak	
Gunung Penanggungan	
Perkebunan Organik Ashitaba	Dlanggu
Wisata Petik Jeruk dan Kopi	
Kampung Coklat Desa Randugenengan	
Lembah Mbencirang	Gondang
Wisata Trail Kawasan Hutan	Jetis
Watu Blorok	
TPA Belahan Tengah	Mojosari

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.3.9

Potensi Wisata Sejarah dan Religi Kabupaten Mojokerto

Potensi Wisata berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Sejarah dan Religi	
Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
Kampung Majapahit	Trowulan
Budha Tidur	
Candi Brahu	
Candi Gentong	
Makam Siti Inggil	
Situs Watesumpak	
Makam Putricampa	
Makam Troloyo	
Situs Kedaton	
Gapura Wringin lawang	
Gapura Bajangratu	
Situs Watesumpak	
Petirtaan Tikus	
Candi Minakjinggo	
Situs kolam segaran	

Pendopo Agung	
Situs Kanal Air	
Petilasan Hayam wuruk	
Situs Lantai segi enam	
Makam Panjang	
Gapura Jedong	
Situs Pasetran	
Candi Bangkal	Ngoro
Candi Genting	
Situs Makam Mendhek	
Situs Klinterejo	Sooko
Petilasan Tribuna Tunggadewi	
Candi Kesimantengah	
Prasasti Petak	
Situs Goa Gembyang	
Temuan lencana	Pacet
girindrawardhana	
Jubel Waterleideng	
Situs Makam Krapyak	
Prasasti Rejoso	
Situs Kemasantani	Gondang
Situs Lindudewi	
Peninggalan Pabrik Kesono	
Situs Balekambang	
Situs Umpak Jabung	
Situs Makam Kiageng jabung	Jatirejo
Situs Makam Kumitir	
Candi Grinting	
Situs Watu Dakon	Pungging
Sumur gantung	
Situs Gapuro	Kemlagi
Situs Mojolebak	
Temuan Lencana	Kutorejo
Girindrawardhana	
Reco Lanang	
Candi Jolotundo	
Situs Kemasantani	
Candi Carik	
Candi Centong	
Candi Kelir	
Candi Kendalisodo	Trawas
Candi Lemari	
Candi Lurah	
Candi Meja	
Candi Naga	
Candi Penanggungan	

Candi Pendowo	
Candi Putri	
Candi Yudho	
Situs Balekambang	
Candi Kama I	
Candi Kama II	
Candi Kama III	
Situs Sumber Tiri	Mojosari
Makam Sayyid Mahmud Ibrahim	Puri
Situs Makam Tumenggung Prawirosono	Bangsal

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.5
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KABUPATEN MOJOKERTO**

(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN KE				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	49,25%	130,98 %	39,90%	-114,00%	n/a	n/a	1970%	4869%	1410%	-
2	Pertumbuhan wisatawan	n/a	8,01%	60,47%	65,42%	n/a	n/a	-	785,29%	83,3%	107,24%
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(-42,32)%	16,09%	45,99%	49,69%	n/a	n/a	73,6%	16519%	85,1%	99,38%
4	Peningkatan prestasi olahraga	12	56	116,00 %	68,60%	n/a	n/a	400%	1866%	-	91,47%
5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68,49	56,47	n/a	n/a	n/a	n/a	107%	94%	-	n/a
6	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	50%	250%	57,14%	46,15%	n/a	n/a	116,28 %	581,40%	142,85%	115,38%
7	Persentase peningkatan promosi pariwisata	-	-	-	50,00%	n/a	n/a	-	-	-	138,89%
8	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	21,75%	23%	31,74%	26,00%	n/a	n/a	87%	8%	105,80%	105,80%
9	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	31,25%	28,57%	17,14%	30,43%	n/a	n/a	178,57 %	163,26%	97,39%	171,92%
10	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	-	2,28%	10,64%	n/a	n/a	n/a	-	22,80%	104,31%	n/a
11	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	10,00%	6,66%	13,33%	10,71%	n/a	n/a	142,86 %	95,14%	189,08%	150,84%
12	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	0,31%	1,05%	3,69%	6,66%	n/a	n/a	4,43%	15,00%	52,64%	95,14%
13	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	0	17,24%	86,28%	8,30%	n/a	n/a	0	172,40%	862,80%	862,80%

Gambaran Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB II

14	Persentase pengembangan kapasitas pramuka	0,20%	1,64%	0,94%	2,60%	n/a	n/a	3,70%	32,80%	17,41%	52,00%
15	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,08%	90,21%	94,69%	91,49%	n/a	n/a	96,76%	100,23%	104,05%	98,38%
16	Indeks Profesionalitas ASN	-	57,07	78,05	83,26 (Tinggi)	n/a	n/a	-	94%	97,56%	101,54%
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (82,02)	A(81,68)	A (81,80)	82,25 (A)	n/a	n/a	99,98%	98,84%	96,27%	96,10%
18	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	1	1	1	n/a	n/a	-	100%	100,00%	100,00%
II. Indikator Kinerja Kunci											
Urusan Pemuda dan Olahraga											
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	7,27	0,11%	0,61%	1,64%						
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(-42,32)	42,95%	63,58%	50,26%						
3	Peningkatan prestasi olahraga	12	56 medali	9 medali	29 medali						
Urusan Kebudayaan											
1	Terlestarikannya cagar budaya	100%	1,93%	100%	100%						
Urusan Pariwisata											
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	0	547,92 %	107,63%						
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Mojokerto	(-34,30)%	8,01%	43,36%	7,15%						
3	Tingkat Hunian Akomodasi	33,44%	31,60%	42,68%	42,18%						
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp1.589.340.000	3,67%	2,04%	2,03%						

5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp2.690.384.300	0,01%	1,33%	3,74%																
---	---	-----------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.6
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO**
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Pariwisata	12.516.196.705	2.737.030.725	5.728.437.200	6.276.624.560	5.497.923.960	2.913.641.400	10.724.235.065	2.710.749.000	4.920.022.211	5.637.062.006	5.207.632.795	2.709.843.488	85,68	99,04	85,89	89,81	94,72	93,01	-	-
2	Kepemudaan	783.000.000	590.209.375	1.093.498.576	710.000.000	275.000.000	520.000.000	744.106.000	286.836.500	950.225.609	675.041.111	273.289.000	484.761.171	95,03	48,60	86,90	95,08	99,38	93,22	-	-
3	Olahraga	4.627.500.000	462.545.000	3.223.375.576	7.356.462.240	9.666.750.000	9.213.500.000	3.790.396.894,85	455.778.750	3.138.428.430	7.279.490.365	9.550.480.964	8.778.007.789	81,91	98,54	97,36	98,95	98,80	95,27	266,44	275,49
4	Kebudayaan	4.045.000.000	724.093.750	3.733.230.000	1.827.306.940	1.582.848.960	1.091.696.900	3.943.734.400	702.234.750	3.089.052.054	1.007.842.396	1.536.827.496	1.043.892.170	97,50	96,98	82,74	55,15	97,09	95,62	-	-
5	Non Urusan (sekretariat)	2.619.303.200	2.619.303.200	7.337.126.274	7.591.543.000	6.106.957.000	7.087.636.200	2.340.029.016	2.283.540.650	6.146.903.067	6.450.561.613	5.618.018.290	6.037.011.170	89,34	87,18	83,78	84,97	91,99	85,18	243,02	239,28

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2024

Secara umum capaian kinerja pelayanan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam arti terjadi peningkatan secara kuantitatif pada setiap kriteria indikator capaian. Hal ini menunjukkan kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap perkembangan seni budaya daerah yang dilakukan oleh masyarakat, seniman, budayawan dan kelompok sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang cukup positif tersebut diatas, secara prinsip dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran dan dukungan masyarakat akan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah di Kabupaten Mojokerto dengan mengedepankan konsep-konsep pengembangan ekonomi lokal dan upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan seni budaya lokal. Selain itu dukungan kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan juga ikut berperan dalam memberikan jalan untuk mengembangkan potensi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Mojokerto secara lebih optimal.

Salah satu indikator pokok dalam menilai keberhasilan pembangunan pariwisata di daerah adalah meningkatnya pertumbuhan wisatawan selama enam tahun selalu mengalami peningkatan. Semakin banyak wisatawan yang datang/berkunjung, maka akan memberikan *multiflier effect* terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Pencapaian ini secara umum disebabkan dan dipengaruhi oleh upaya-upaya dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kabupaten Mojokerto melalui program dan kegiatan antara lain pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana obyek wisata, penyelenggaraan event-event seni dan budaya.

Pengembangan investasi kepariwisataan berkaitan dengan sejauhmana peran pihak ketiga/swasta diluar Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah melalui pembukaan usaha-usaha pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Investasi kepariwisataan yang tinggi akan memberikan peluang-peluang dalam meningkatkan aktivitas perekonomian daerah baik dalam bentuk perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat dan penguatan produk ekonomi lokal. Dari sisi pencapaian indikator aspek pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 s/d 2023. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut diatas secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan produk ekonomi kreatif.

Dan juga PAD sektor pariwisata setelah pandemic covid juga berangsur-angsur meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp 2.690.384.300

meningkat tiga kali lipat tahun 2022 Rp 6.214.169.102,98 dan pada tahun 2023 PAD sector Pariwisata sebesar Rp 8.698.945.147 Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada retribusi obyek wisata sebagai akibat dari kenaikan pada jumlah pengunjung obyek wisata dan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kendati capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagian besar baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disbudporapar Kabupaten Mojokerto.

2.4.1. Peluang (Opportunities)

- 1) Trowulan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional
- 2) Adanya kerjasama/kemitraan antara pemerintah dan swasta maupun dengan perguruan tinggi
- 3) Semakin bertambahnya jumlah wisatawan dalam dan luar negeri
- 4) Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Mojokerto cukup besar
- 5) Posisi geografis Kabupaten Mojokerto sangat strategis, berdekatan dengan ibukota propinsi Jawa Timur serta berada pada jalur lintasan antar kota di Jawa Timur;
- 6) Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;
- 7) Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank,kantor pos, listrik, air bersih dll);
- 8) Kesadaran pemuda mulai tumbuh akan tanggung jawabnya sebagai potensi dalam pembangunan karakter bangsa

2.4.2. Tantangan (Threats)

- 1) Ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat
- 2) Rendahnya minat generasi muda dalam pengembangan seni budaya daerah

- 3) Derasnya arus informasi berbagai budaya asing lewat media yang berpengaruh terhadap karakter dan budaya asing
- 4) Persaingan antar daerah dalam hal inovasi dan kreativitas seni budaya sangat tinggi.
- 5) Keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan kesan kumuh;
- 6) Alokasi kebijakan pembangunan kepemudaan masih kecil
- 7) Kurang terselenggaranya pelatihan kompetisi dan kejuaraan daerah

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pelestarian budaya daerah dan daya saing pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Peningkatan pelestarian budaya daerah dan daya saing pariwisata memerlukan keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Kepariwisata. Indikator yang umum digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan adalah melalui 3 sub indeks, yaitu : (1) kerangka kebijakan pemerintah; (2) infrastruktur dan lingkungan bisnis; dan (3) sumber daya manusia, alam dan budaya. Dari ketiga sub indeks tersebut, dipilah menjadi 14 pilar pengukuran daya saing, yaitu :

1. Kebijakan dan Peraturan, yang meliputi : (1) Kepemilikan Asing (Investasi); (2) Hak Kepemilikan Usaha; (3) Dampak Peraturan terhadap Usaha; (4) Kebutuhan Visa; (5) Perjanjian Ruang Udara Terbuka; (6) Keterbukaan Kebijakan Pemerintah; dan (7) Biaya Perijinan Usaha
2. Keberlanjutan Lingkungan, yang meliputi : (1) Peraturan Pelestarian Lingkungan; (2) Penegakan Peraturan Pelestarian Lingkungan; (3) Perkembangan industri perjalanan wisata; (4) Tingkat emisi karbondioksida/gas rumah kaca; (5) Konsentrasi perlindungan alam; (6) Ancaman kepunahan spesies hewan; dan (7) Perjanjian ratifikasi pelestarian lingkungan
3. Keselamatan dan Keamanan, yang meliputi : (1) Penanggulangan terorisme; (2) Penegakan hukum oleh kepolisian; (3) Penanggulangan kejahatan dan kekerasan; dan (4) Tingkat kecelakaan lalu-lintas

4. Kesehatan dan Kebersihan, yang meliputi : (1) Ketersediaan tenaga kesehatan; (2) Akses pelayanan kesehatan; (3) Akses kelayakan air minum; dan (4) Ketersediaan fasilitas tempat tidur rumah sakit
5. Prioritas mengenai kepariwisataan, yang meliputi : (1) Prioritas kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata; (2) Pembiayaan Pemerintah bagi pengembangan industri pariwisata; (3) Efektifitas pemasaran dan branding untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; dan (4) Keberadaan/jumlah industri pariwisata
6. Infrastruktur transportasi udara, yang meliputi : (1) Kualitas pelayanan transportasi udara; (2) Ketersediaan kursi penerbangan domestic; (3) Ketersediaan kursi penerbangan internasional; (4) Volume keberangkatan per 1000 penduduk; (5) Kepadatan jumlah penerbangan di bandara; (6) Jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi; dan (7) Jaringan transportasi udara internasional
7. Infrastruktur transportasi darat, yang meliputi : (1) Kualitas jalan raya; (2) Kualitas infrastruktur kereta api; (3) Kualitas infrastruktur pelabuhan; (4) Kualitas jaringan transportasi domestik; dan (5) Tingkat kepadatan lalu-lintas jalan raya
8. Infrastruktur pariwisata, yang meliputi : (1) Jumlah Kamar Hotel; (2) Penyewaan mobil; dan (3) Ketersediaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
9. Infrastruktur teknologi informasi, yang meliputi : (1) Usaha jaringan internet; (2) Pengguna internet; (3) Jalur sambungan telepon; (4) Jumlah pelanggan internet; dan (5) Jumlah pengguna telepon selular
10. Daya saing harga, yang meliputi : (1) Pajak bandara; (2) Daya beli masyarakat; (3) Cakupan perpajakan; (4) Tingkat harga BBM (Bahan Bakar Minyak); dan (5) Indeks harga hotel
11. Sumber daya manusia, yang meliputi : (1) Tingkat pendidikan dasar penduduk; (2) Tingkat pendidikan menengah penduduk; (3) Kualitas system pendidikan; (4) Ketersediaan penelitian dan pelatihan khusus; (5) Tingkat pelatihan; (6) Jumlah pegawai yang dipekerjakan dan diberhentikan; (7) Kemudahan perizinan kerja tenaga asing; (8) Resiko penularan HIV; (9) Dampak perkembangan HIV terhadap usaha; dan (10) Tingkat harapan hidup penduduk
12. Daya tarik wisata, yang meliputi : (1) Keterbukaan pariwisata; (2) Sikap penduduk terhadap wisatawan asing; (3) Lama tinggal wisatawan

13. Sumber daya alam, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan dunia; (2) Kawasan yang dilindungi; (3) Kualitas lingkungan alam; dan (4) Jumlah spesies hewan yang dilindungi
14. Sumber daya budaya, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan budaya; (2) Jumlah stadion olahraga; (3) Jumlah pameran dan ekshibisi tingkat internasional; dan (4) Ekspor industri kreatif

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Kabupaten Mojokerto pada tataran regional dan nasional, harus pula memperhatikan positioning daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratisasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi PD adalah dengan melakukan analisis lingkungan yang strategis yang meliputi sisi internal PD dan sisi eksternal PD sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis PD.

1.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, sasaran jangka menengah pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dispora Provinsi Jawa Timur, Disbudpar Propinsi Jawa Timur, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis Disparpora Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pembinaan atlit dan terbatasnya sarana olahraga.
1. Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan masyarakat;

2. Lemahnya pemahaman sejarah lokal;
3. Lemahnya data serta informasi kebudayaan;
4. Minimnya produk ekonomi kreatif lingkup seni budaya
5. Dukungan partisipasi generasi muda dalam kegiatan ekonomi produktif, baik dalam proses produksi, inovasi dan pemasaran berbasis digital masih kurang.
6. Pelatihan generasi muda dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat masih kurang.
7. Sarana olahraga masih terbatas.
6. Pembinaan atlet masih kurang.
7. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata
8. Masih lemahnya pengembangan destinasi wisata;
9. Lemahnya branding pariwisata yang berkelanjutan serta kurangnya promosi /pemasaran pariwisata yang sinergis dan kolaboratif;
10. Rendahnya SDM pelaku industri kepariwisataan;
11. Lemahnya data serta informasi pariwisata;
12. Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
13. Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (ecotourism), pariwisata berbasis historical/ dan berbasis religi
14. Masih rendahnya daya tarik pariwisata dan pengelolaan potensi wisata khususnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
15. Belum terpenuhinya variabel pendukung pembangunan kepariwisataan yaitu access (akses), attraction (daya tarik pariwisata), amenities (sarana prasarana) dan accomodation (akomodasi); dan
16. Rendahnya akselerasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan.

A. Rumusan Isu Strategis 2025-2029

Perumusan isu strategis dan arah kebijakan dalam dokumen Renstra Disbudporapar Kabupaten Mojokerto 2025-2029 tidak dapat dilepaskan dari isu-isu strategis yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagaimana tercermin dalam hasil analisis KLHS Kabupaten Mojokerto, terdapat sejumlah tantangan fundamental pembangunan berkelanjutan; mulai dari kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan kebencanaan yang masih rendah, penguatan ekonomi daerah dan infrastruktur yang belum optimal, hingga kualitas sumber daya manusia yang belum merata dan sistem perlindungan sosial yang belum sepenuhnya adaptif. Selain itu, kelembagaan pemerintahan juga ditandai oleh lemahnya sinergi, efektivitas program, serta

keterbatasan inovasi dan data yang mutakhir.

Dalam konteks global dan nasional, arah pembangunan saat ini telah bergeser ke model pembangunan yang berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, ekonomi hijau dan biru, serta reformasi tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah pusat melalui RPJMN dan kebijakan Satu Data Indonesia menekankan pentingnya data sebagai fondasi perencanaan, pentingnya inovasi daerah, serta kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan kesenjangan sosial.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perumusan isu strategis Disbudporapar Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2029 harus bersifat transformatif, berbasis bukti, dan terhubung secara vertikal-horisontal dengan kebijakan di level nasional, provinsi, dan global. Oleh karena itu, telah disusun suatu matriks keterkaitan antara permasalahan-permasalahan utama internal Bappeda dengan isu-isu strategis pembangunan lintas level sebagai dasar analitis dalam menetapkan prioritas kebijakan dan strategi organisasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Situs Majapahit dan warisan budaya lokal	Kurangnya pelestarian dan promosi situs budaya	Penurunan kualitas lingkungan dan budaya akibat kurangnya perlindungan aset budaya	Hilangnya identitas budaya lokal secara global	Pelestarian cagar budaya	Pemanfaatan kawasan Trowulan belum optimal	Pelestarian dan pemanfaatan situs budaya Majapahit
Kepemudaan dengan potensi kewirausahaan	Rendahnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan	Ketimpangan akses ekonomi dan sosial pemuda	Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan berkelanjutan	Bonus demografi	Pemuda belum diberdayakan di tingkat desa	Pemberdayaan dan penguatan kapasitas pemuda
Potensi wisata alam: Gunung Penanggungan, air terjun, desa wisata	Belum optimalnya promosi dan infrastruktur wisata	Ketidakseimbangan pemanfaatan ruang dan potensi alam	Tren eco-tourism dan green destination	Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional	Daya tarik wisata belum dikenal luas	Pengembangan destinasi wisata berbasis alam dan budaya
Potensi olahraga dan SDM atlet daerah	Minimnya fasilitas dan pembinaan atlet muda	Ketimpangan akses olahraga masyarakat	Peningkatan kualitas hidup melalui olahraga	Desentralisasi pembinaan olahraga	Sarana olahraga desa kurang memadai	Peningkatan sarana dan pembinaan olahraga berbasis potensi lokal
Integrasi bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata	Program masih berjalan sendiri-sendiri	Ketidakefisienan penggunaan sumber daya pembangunan daerah	Konvergensi lintas sektor untuk pembangunan berkelanjutan	Kolaborasi antar sektor dalam RPJMN	Kinerja dinas belum maksimal karena tumpang tindih program	Sinergi lintas bidang untuk efektivitas pembangunan sektor

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan merupakan komponen perencanaan strategis yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan jangka menengah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Penetapan tujuan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata didasarkan oleh sasaran jangka menengah yang mendukung misi Kepala Daerah yang menjadi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata. Adapun tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2021 – 2026 adalah **“Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata, sejarah, ecotourism dll)”**.

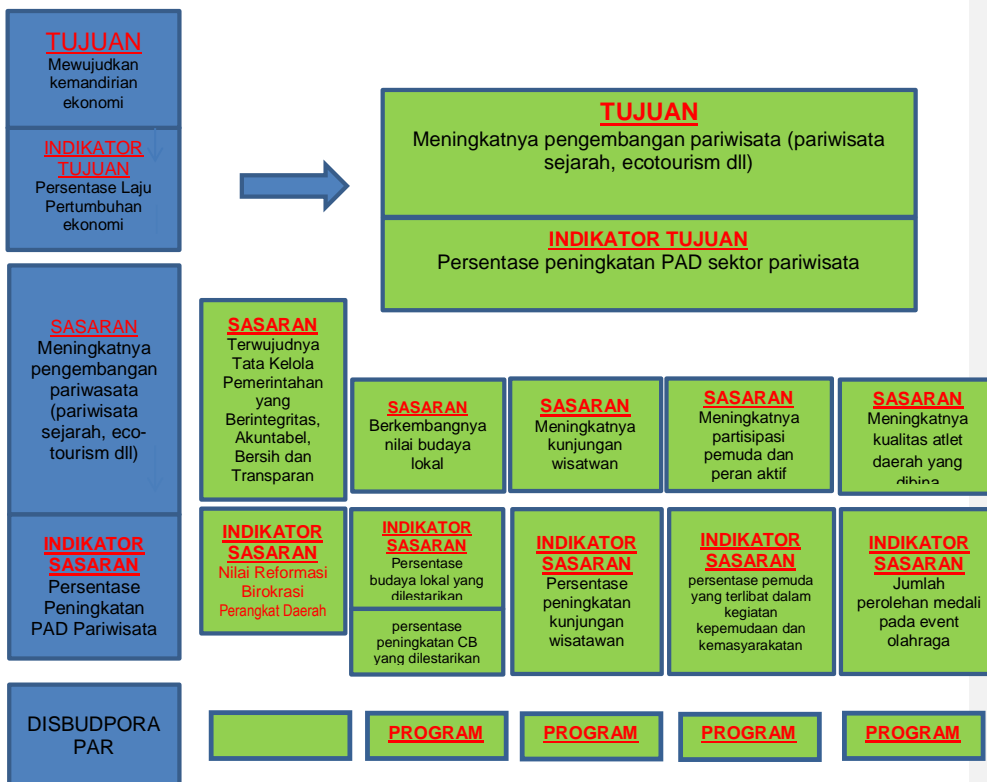
Dalam upaya pencapaian tujuan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan OPD dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki OPD secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Perumusan sasaran harus memiliki beberapa kriteria yang digunakan untuk membuat sasaran tersebut lebih tegas dan jelas. Kriteria tersebut yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2026 – 2030 adalah :

1. Berkembangnya Budaya Lokal
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan
3. Meningkatnya partisipasi pemuda dan peran aktif
4. Meningkatnya kualitas atlet daerah yang dibina
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan

6. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Gambar 4.1.1. Kerangka Logis Pencapaian Misi 3
KERANGKA LOGIS PENCAPAIAN MISI III KEPALA DAERAH
(Tahun 2026 - 2030)



Misi : Membangun Kemandirian Ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan Usaha Mikro serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Disbudporapar Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

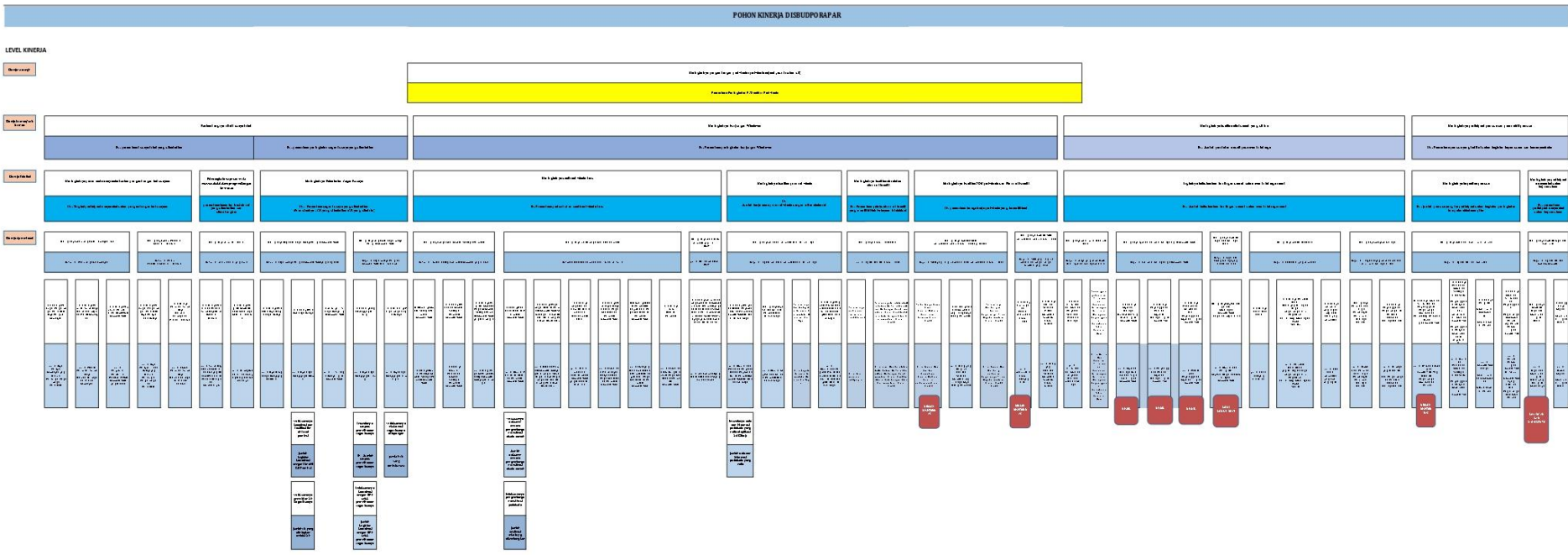
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata, sejarah, ecotourism dll)			Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	7%	8%	9%	10%	11%	12%	
	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata, sejarah, ecotourism dll)		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	7%	8%	9%	10%	11%	12%	
		Meningkatnya partisipasi pemuda dan peran aktif pemuda	persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan	n/a	52%	55%	57%	60%	62%	
		Meningkatnya kualitas atlet daerah yang dibina	Jumlah perolehan medali pada event olahraga	n/a	100 medali	110 medali	120 medali	130 medali	140 medali	
		Berkembangnya nilai budaya lokal	persentase budaya lokal yang dilestarikan	n/a	16%	17%	18%	19%	19%	
			persentase peningkatan CB yang dilestarikan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan Wisatawan	45%	7%	8%	9%	10%	11%	
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Nilai SAKIP	83,84 (A)	82,34 (A)	82,44 (A)	82,54 (A)	82,74 (A)	82,87 (A)	
			Persentase Realisasi Anggaran	94,80%	95%	95,25%	95,50%	95,80%	95,92%	
			Indeks Profesional ASN	83,5 (Tinggi)	84 (Tinggi)	84,5 (Tinggi)	85 (Tinggi)	85,5 (Tinggi)	85,75 (Tinggi)	
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2025

Untuk menjabarkan dan menyelaraskan sasaran, indikator kinerja, dan targetnya dari level unit organisasi yang lebih tinggi ke level unit organisasi setingkat lebih rendah maka disusun sebuah Pohon Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang tergambar dengan tabel di bawah ini:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB III



III.2 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

3.3 Sasaran Strategi Perangkat Daerah

Bahwa sesuai gambaran desain pohon kinerja diatas, pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Berikut ini disampaikan tahapan tahapan penyusunan tujuan, sasaran rencana strategis perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, tahapan selanjutnya adalah merumuskan strategi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang perlu dipersiapkan adalah menjamin ketersediaan kebijakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029. Strategi dan arah kebijakan tersebut antara lain :

Tabel 3.3.1 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MOJOKERTO

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR			
MISI 3 : MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI BAGI INDUSTRI PADA SEMUA TINGKATAN, KOPERASI DAN UM (USAHA MIKRO) SERTA BUMDesa YANG BERBASIS MASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata, sejarah, ecotourism dll)	Meningkatnya partisipasi pemuda dan peran aktif pemuda	Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
	Berkembangnya nilai budaya local	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kesenian Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Lembaga Kesenian

		Pelestarian Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya Kapasitas Pelaku Seni Budaya 3. Meningkatnya Pembinaan Kesenian Tradisional 1. Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	<p>Peningkatan Diversifikasi Destinasi wisata</p> <p>Pengembangan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya 1. Meningkatnya Pengelolaan destinasi wisata 2. Terlaksananya Pemenuhan kelengkapan fasilitas pariwisata 3. Meningkatnya Promosi Pariwisata 1. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Terlaksananya Fasilitasi sertifikasi kompetensi sdm pariwisata 3. Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Langkah berikutnya dari penyusunan arah dan tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pebahapan prioritas urusan Pariwisata, urusan Kebudayaan, urusan Pemuda dan Olahraga dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan tersebut antara lain :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

3.5. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah dan kebijakan renstra perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra OPD. Berikut ini dilampirkan tabel teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra OPD :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (diambil dari RPJMD)

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perumusan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	
	Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan	Hilirisasi SDA melalui penyediaan Infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	
	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	

	Pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan	Penyediaan keamanan, ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketentraman Wilayah	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	
	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	Memperkuat Ketahanan melalui Penguatan usaha Pemeliharaan dan Pelestarian Sosial, budaya, dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan wilayah	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	
			Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	
			Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	
			Meningkatnya Lembaga Kesenian	
			Meningkatnya Kapasitas Pelaku Seni Budaya	
			Meningkatnya Pembinaan Kesenian Tradisional	
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	
			Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya	
			Meningkatnya Pengelolaan destinasi wisata	
			Terlaksananya Pemenuhan kelengkapan fasilitas pariwisata	
			Meningkatnya Promosi Pariwisata	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Terlaksananya Fasilitasi sertifikasi kompetensi sdm pariwisata	
			Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai rencana program dan kegiatan Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, program prioritas dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang kemudian dijadikan komitmen strategi dan kebijakan perencanaan jangka menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025-2029 berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Namun dalam pelaksanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Mojokerto. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Untuk mewujudkan satu sasaran tahunan diperlukan minimal satu program. Dan program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah untuk kumpulan kegiatan yang sejenis dan erat terkait.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 6.1

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (7)	KET. (8)
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata, sejarah, ecotourism dll)							
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

				IP ASN Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya partisipasi pemuda dan peran aktif pemuda			Persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan		
			jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kompetensi/keterampilan		jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kompetensi/keterampilan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				jumlah kegiatan fasilitasi kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kpasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	
						Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	

						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
			persentase partisipasi masyarakat dalam kepramukaan		persentase partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
				jumlah kegiatan fasilitasi Kwardcab Kabupaten	jumlah kegiatan fasilitasi Kwardcab Kabupaten	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
						Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
						Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya kualitas atlet daerah yang dibina			Jumlah perolehan medali pada event olahraga		
			Jumlah keikutsertaan kontingen daerah dalam event olahraga resmi		Jumlah keikutsertaan kontingen daerah dalam event olahraga resmi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraaan	
				jumlah pelajar yang berpartisipasi dalam kejuaraan olahraga pendidikan	jumlah pelajar yang berpartisipasi dalam kejuaraan olahraga pendidikan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

						Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	
				jumlah even pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	jumlah even pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)	
						Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
						Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				jumlah atlet daerah yang berprestasi	jumlah atlet daerah yang berprestasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
						Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
						Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	

				jumlah organisasi olahraga yang terdaftar dan aktif	jumlah organisasi cabang olahraga yang terdaftar dan aktif	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
						Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
						Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perkumpulan olahraga rekreasi	jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perkumpulan olahraga rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
						Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
						Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
		Berkembangnya nilai budaya lokal			persentase budaya lokal yang dilestarikan		
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan (SDG's)	
				Jumlah Pelaku pengelola kebudayaan	Jumlah Pelaku pengelola kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
						Penyusunan Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	

				Jumlah Pelaku Pelestarian Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan		persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional (SDG's)	
				Jumlah pelaku seni yang dibina	Jumlah pelaku seni yang dibina	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
						Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (SDG's)	
				Jumlah cagar budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang teregistrasi	Jumlah cagar budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang teregistrasi	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
						Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
						Penetapan Cagar Budaya	
						Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	
				jumlah cagar budaya Peringkat Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	jumlah cagar budaya Peringkat Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
						Pelindungan Cagar Budaya	
						Pengembangan Cagar Budaya	

						Pemanfaatan Cagar Budaya	
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan			Persentase peningkatan kunjungan Wisatawan		
			Presentase pertumbuhan destinasi wisata baru		Presentase pertumbuhan destinasi wisata baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)	
						Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	
				persentase destinasi wisata dalam kondisi baik/prima	persentase destinasi wisata dalam kondisi baik/prima	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)	
						Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	

						Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				jumlah fasilitasi penetapan TDUP	jumlah fasilitasi penetapan TDUP	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)	
						Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	
			Jumlah kerja sama promosi wisata dengan mitra eksternal		Jumlah kerja sama promosi wisata dengan mitra eksternal	Program Pemasaran Pariwisata (SDG's)	
				jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
						Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
						Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	

			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual (SDG's)	
				Jumlah kegiatan fasilitasi ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan fasilitasi ekonomi kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
						Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	
						Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
			persentase tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi		persentase tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SDG's)	
				jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dasar pariwisata dan ekonomi kreatif	jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dasar pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
						Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)	
						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan	jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN, KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Berdasarkan pada tabel diatas, didapatkan bahwa Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto melaksanakan 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan, kemudian di level Sasaran terdapat 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Sementara itu untuk di level program terdiri dari 5 (lima) program dan 6 (enam) indikator program. Sedangkan pada level kegiatan/ sub kegiatan terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu periode tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis yang disusun.

Setelah tahapan merumuskan program/ kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, langkah berikutnya adalah menyusun rencana program/ kegiatan/ dan sub kegiatan dengan diberikan jumlah penganggaran yang dibutuhkan pada kondisi ideal OPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan program-program pembangunan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mojokerto, berikut ini adalah tabel perumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan disertai kebutuhan penganggarnya :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029

(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5			
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
							Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17			
KODE SKPD																				
NAMA SKPD																				
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLARHAGADAN PARIWISATA																				
2025-2030																				
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)					Presentase peningkatan PAD Pariwisata		7%		8%		9%		10%		11%		12%		12%	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan																			
			X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,25 (A)	83,84 (A)	6.674.345.200	82,34 (A)	6.994.891.800	82,44 (A)	6.866.102.800	82,54 (A)	6.802.702.800	82,74 (A)	7.087.002.800	82,87 (A)	7.222.502.800	82,87 (A)	7.222.502.800

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	60%	65%		68%		70%		73%		75%		77%		77%	
			X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
			21 unit	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	8 laporan	0	8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan	
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,49%	94,8%	5.372.796.000	95%	5.372.796.000	95,25%	5.587.496.000	95,5%	5.672.796.000	95,8%	5.987.496.000	95,92%	5.987.496.000	95,92%	#####
			X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	38 orang/bulan	5.372.796.000	38 orang/bulan	5.372.796.000	38 orang/bulan	5.587.496.000	38 orang/bulan	5.672.796.000	40 orang/bulan	5.987.496.000	40 orang/bulan	5.987.496.000	40 orang/bulan	5.987.496.000
			X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0												
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	83,26 (Tinggi)	83,5 (Tinggi)		84 (Tinggi)	17.100.000	84,5 (Tinggi)	-	85 (Tinggi)	30.400.000	85,5 (Tinggi)	-	85,75 (Tinggi)	-	85,75 (Tinggi)	-
			X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0		38 paket	17.100.000			38 paket	30.400.000						
			X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0													

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

			X.XX.01. 2.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0													
			X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	94 %	166.050.600	95 %	270.489.000	95%	264.100.000	96%	265.000.000	97%	265.000.000	97%	310.000.000	97 %	310.000.000
			X.XX.01. 2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	9 pak et	11.680.000	3 pak et	105.489.000	3 pake t	89.100.000	3 paket	90.000.000	4 paket	90.000.000	4 paket	100.000.000	4 pa ket	100.000.000
			X.XX.01. 2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 pak et	28.000.000	3 pak et	25.000.000	3 pake t	25.000.000	3 paket	25.000.000	3 paket	25.000.000	3 paket	30.000.000	3 pa ket	30.000.000
			X.XX.01. 2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 pak et	40.320.000	2 pak et	50.000.000	2 pake t	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	60.000.000	2 pa ket	60.000.000
			X.XX.01. 2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 doku men	12 doku men	4.025.000	12 doku men	5.000.000	12 doku men	5.000.000	12 doku men	5.000.000	12 doku men	5.000.000	12 doku men	5.000.000	12 do ku me n	5.000.000
			X.XX.01. 2.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	4 pak et	38.000.000	4 pak et	40.000.000	4 pake t	40.000.000	4 paket	40.000.000	4 paket	40.000.000	4 paket	50.000.000	4 pa ket	50.000.000
			X.XX.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lapora n	12 lapo ra n	44.025.600	12 lapo ra n	45.000.000	12 lapo ra n	55.000.000	12 lapo ra n	55.000.000	12 lapo ra n	55.000.000	12 lapo ra n	65.000.000	12 lapo ra n	65.000.000
			X.XX.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	94 %	652.263.570	95 %	749.506.800	95%	749.506.800	96%	749.506.800	97%	749.506.800	97%	755.006.800	97 %	755.006.800

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	279.200.000	12 laporan	279.500.000	12 laporan	279.500.000	12 laporan	279.500.000	12 laporan	279.500.000	12 laporan	285.000.000	12 laporan	285.000.000
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	373.063.570	12 laporan	470.006.800	12 laporan	470.006.800	12 laporan	470.006.800	12 laporan	470.006.800	12 laporan	470.006.800	12 laporan	470.006.800
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	91%	94%	483.235.030	95%	585.000.000	95%	265.000.000	96%	85.000.000	97%	85.000.000	97%	170.000.000	97%	170.000.000
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 unit	21 unit	64.678.600	21 unit	65.000.000	21 unit	65.000.000	21 unit	65.000.000	21 unit	65.000.000	21 unit	70.000.000	21 unit	70.000.000
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0												
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	399.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	180.000.000					1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	4 unit	19.556.430	4 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000

	Meningkatnya partisipasi pemuda dan peran aktif pemuda																			
		Persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan						52%		55%		57%		60%		62%		62%		
			2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kompetensi/kerampilan	n/a	n/a	144.554.976	300 pemuda	850.000.000	350 pemuda	1.000.000.000	300 pemuda	950.000.000	350 pemuda	1.120.000.000	400 pemuda	1.450.000.000	400 pemuda	1.450.000.000
			2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	jumlah kegiatan fasilitasi kepemudaan	n/a	n/a	144.554.976	5 kegiatan	850.000.000	6 kegiatan	1.000.000.000	5 kegiatan	950.000.000	6 kegiatan	1.120.000.000	6 kegiatan	1.450.000.000	6 kegiatan	1.450.000.000
			2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kpasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		120 orang													
			2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-	0	0	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000				1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

			2.19.03.2 .01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 unit	2 unit	345.357.504	2 unit	7.400.000.000	2 unit	7.400.000.000	2 unit	5.000.000.000	2 unit	5.000.000.000	2 unit	5.000.000.000	2 unit	#####
			2.19.03.2 .01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraa n Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	-	0		3 dok um en	350.000.000	3 dok um en	350.000.000	3 dok um en	350.000.000	3 dok um en	350.000.000	3 dok um en	350.000.000	3 dok um en	350.000.000
			2.19.03.2 .02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah even pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	n/a	0		6 keg ia ta n	1.725.000.000	2 kegia tan	75.000.000	6 kegia tan	1.725.000.000	2 kegia tan	75.000.000	2 kegia tan	1.750.000.000	2 kegia tan	1.750.000.000
			2.19.03.2 .02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kabupaten Layak Anak)	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 kegia tan	0		2 keg ia ta n	75.000.000	2 kegia tan	75.000.000	2 kegia tan	75.000.000	2 kegia tan	75.000.000	3 kegia tan	100.000.000	3 kegia tan	100.000.000
			2.19.03.2 .02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraa n Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	-			3 keg ia ta n	350.000.000			3 kegia tan	350.000.000			3 kegia tan	350.000.000	3 kegia tan	350.000.000
			2.19.03.2 .02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraa n Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	-	0		300 ora ng	1.300.000.000	0	0	300 ora ng	1.300.000.000			300 ora ng	1.300.000.000	300 ora ng	1.300.000.000
			2.19.03.2 .03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang berprestasi	n/a	n/a	50.000.000	75 ora ng	3.150.000.000	40 ora ng	800.000.000	75 ora ng	3.150.000.000	40 ora ng	800.000.000	75 ora ng	3.150.000.000	75 ora ng	3.150.000.000
			2.19.03.2 .03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	81 ora ng	12 ora ng	50.000.000	75 ora ng	3.000.000.000	40 ora ng	650.000.000	75 ora ng	3.000.000.000	40 ora ng	650.000.000	75 ora ng	3.000.000.000	75 ora ng	3.000.000.000
			2.19.03.2 .03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan	0			1 pel at da	150.000.000	1 pelat da	150.000.000	1 pelat da	150.000.000	1 pelat da	150.000.000	1 pelat da	150.000.000	1 pelat da	150.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

				Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (pelatda)															
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	0														
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi cabang olahraga yang terdaftar dan aktif	n/a	n/a	4.550.000.000	60 organisasi	2.500.000.000	60 organisasi	5.500.000.000	75 organisasi	2.500.000.000	75 organisasi	5.500.000.000	80 organisasi	5.500.000.000	80 organisasi	5.500.000.000
		2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	-	0													
		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	4.550.000.000	3 dokumen	2.500.000.000	3 dokumen	5.500.000.000	3 dokumen	2.500.000.000	3 dokumen	5.500.000.000	3 dokumen	5.500.000.000	3 dokumen	5.500.000.000
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perkumpulan olahraga rekreasi	0	0		1550 orang	450.000.000	1550 orang	450.000.000	1550 orang	450.000.000	1550 orang	450.000.000	1550 orang	450.000.000	1550 orang	450.000.000
		2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0	0		1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000		150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000
		2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi (lembaga)	0			3 kelompok	300.000.000	3 kelompok	300.000.000	3 kelompok	300.000.000	3 kelompok	300.000.000	3 kelompok	300.000.000	3 kelompok	300.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

			2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku pengelola kebudayaan	n/a		50 orang	250.000.000	75 orang	275.000.000	75 orang	275.000.000	75 orang	300.000.000	100 orang	350.000.000	100 orang	350.000.000	
			2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek kemajuan kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)	-		1 objek (GS BD)	250.000.000	1 kegiatan (GS BD)	275.000.000	1 kegiatan (GS BD)	275.000.000	1 kegiatan (GS BD)	300.000.000	1 kegiatan (GS BD)	350.000.000	1 kegiatan (GS BD)	350.000.000	
			2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-														
			2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Pelestarian Kesenian Tradisional	n/a	n/a	400.000.000	100 orang	900.000.000	100 orang	925.000.000	150 orang	925.000.000	150 orang	950.000.000	175 orang	1.000.000.000	175 orang	1.000.000.000
			2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	3 objek	400.000.000	1 objek	150.000.000	1 objek	175.000.000	1 objek	175.000.000	1 objek	200.000.000	1 objek	250.000.000	1 objek	250.000.000
			2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-			3 laporan ()	750.000.000	3 laporan ()	750.000.000	3 laporan	750.000.000	3 laporan	750.000.000	3 laporan	750.000.000	3 laporan	750.000.000
			2.22.02.3.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	-			3 kegiatan	450.000.000		-		-	3 kegiatan	475.000.000	3 kegiatan	475.000.000	3 kegiatan	475.000.000
			2.22.02.3.01.0004	Penyusunan Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang tersedia	-			1 dokumen	450.000.000					2 dokumen	475.000.000	2 dokumen	475.000.000	2 dokumen	475.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

			3.26.02.2 .02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-			1 dok um en	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	100.000.000	
			3.26.02.2 .02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1 dok um en	100.000.000	2 dok um en	200.000.000	2 doku men	200.000.000	2 doku men	200.000.000	2 doku men	200.000.000	2 doku men	200.000.000	200.000.000	
			3.26.02.2 .02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-														
			3.26.02.2 .02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Orang Pariwisata Strategis Kab/Kota yang dikembangkan	-			100 ora ng	60.000.000	100 oran g	65.000.000	100 oran g	70.000.000	100 oran g	75.000.000	100 oran g	75.000.000	100 oran g	75.000.000
			3.26.02.2 .02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-														
			3.26.02.2 .03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)	persentase destinasi wisata dalam kondisi baik/prima	n/a	n/a	1.797.200.768	30 %	3.800.000.000	32%	3.535.000.000	35%	3.660.000.000	37%	3.820.000.000	40%	4.025.000.000	40 %	4.025.000.000
			3.26.02.2 .03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan				1 dok um en	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000
			3.26.02.2 .03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 lokasi	2 lokasi	1.287.200.768	2 lokasi	2.000.000.000	2 lokasi	2.100.000.000	2 lokasi	2.200.000.000	2 lokasi	2.300.000.000	3 lokasi	2.500.000.000	3 lokasi	#####

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

			3.26.02.2 .03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 unit	9 unit	300.000.000	10 unit	400.000.000	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	0
			3.26.02.2 .03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-			1 laporan	50.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	
			3.26.02.2 .03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-			1 lokasi	1.000.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	
			3.26.02.2 .03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	
			3.26.02.2 .04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)	Jumlah fasilitas penetapan TDUP	n/a	n/a	49.554.976	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000	
			3.26.02.2 .04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	30 usaha	40 usaha	49.554.976	80 usaha	100.000.000	80 usaha	100.000.000	80 usaha	100.000.000	80 usaha	100.000.000	80 usaha	100.000.000	80 usaha	100.000.000	
			3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata (SDG's)	Jumlah kerja sama promosi wisata dengan mitra eksternal	n/a	n/a	357.109.952	4 mitra	2.610.000.000	4 mitra	2.310.000.000	5 mitra	2.640.000.000	5 mitra	2.490.000.000	6 mitra	2.790.000.000	6 mitra	2.790.000.000	
			3.26.03.2 .01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	n/a	n/a	357.109.952	3 kegiatan	2.610.000.000	3 kegiatan	2.310.000.000	3 kegiatan	2.640.000.000	4 kegiatan	2.490.000.000	4 kegiatan	2.790.000.000	4 kegiatan	2.790.000.000	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

			3.26.03.2 .01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 dokumen	3 dokumen	132.554.976	4 dokumen	300.000.000	4 dokumen	350.000.000	5 dokumen	400.000.000	5 dokumen	500.000.000	5 dokumen	500.000.000	5 dokumen	500.000.000
			3.26.03.2 .01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 kegiatan	2 kegiatan	144.554.976	5 kegiatan	2.000.000.000	4 kegiatan	1.750.000.000	5 kegiatan	2.000.000.000	4 kegiatan	1.750.000.000	5 kegiatan	2.000.000.000	5 kegiatan	2.000.000.000
			3.26.03.2 .01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	90.000.000
			3.26.03.2 .01.0004	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-			1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000
			3.26.03.2 .01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	0													
				Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah yang dibentuk	-			1 lembaga	150.000.000	1 lembaga	50.000.000	1 lembaga	50.000.000	1 lembaga	50.000.000	1 lembaga	50.000.000	1 lembaga	50.000.000
						-														

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

			3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual (SDG's)	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	n/a	n/a	0	22%	125.000.000	25,00%	50.000.000	27,00%	175.000.000	30,00%	20.000.000	32,00%	175.000.000	32,00%	175.000.000
			3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi insan kreatif	n/a	0		2 kegiatan	125.000.000	1 kegiatan	50.000.000	2 kegiatan	175.000.000	4 kegiatan	20.000.000	2 kegiatan	175.000.000	2 kegiatan	175.000.000
			3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha	-			20 orang	100.000.000			20 orang	150.000.000			20 orang	150.000.000	20 orang	150.000.000
			3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	25 produk	0		20 produk	25.000.000	20 produk	50.000.000	20 produk	25.000.000	20 produk	20.000.000	20 produk	25.000.000	20 produk	25.000.000
			3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SDG's)	persentase tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	n/a	n/a	130.000.000	8,00%	700.000.000	10,00%	550.000.000	12,00%	750.000.000	15,00%	550.000.000	17,00%	950.000.000	17,00%	950.000.000
			3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dasar pariwisata dan ekonomi kreatif	n/a	n/a	80.000.000	100 orang	400.000.000	30 orang	200.000.000	100 orang	450.000.000	30 orang	200.000.000	120 orang	550.000.000	120 orang	550.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

		3.26.05.2 .01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Kabupaten Layak Anak)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	0		1 lap ora n	200.000.000			1 lapo ran	250.000.000			1 lapo ran	250.000.000	1 lapo ran	250.000.000
		3.26.05.2 .01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	0													
		3.26.05.2 .01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 orang	30 ora ng	80.000.000	30 ora ng	100.000.000	30 oran g	100.000.000	30 oran g	100.000.000	30 oran g	100.000.000	30 oran g	150.000.000	30 oran g	150.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

			3.26.05.2 .01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	0		1 dok um en	100.000.000	1 dok u men	100.000.000	1 dok u men	100.000.000	1 dok u men	100.000.000	1 dok u men	150.000.000	1 dok u men	150.000.000
			3.26.05.2 .02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan	n/a	n/a	50.000.000	110 ora ng	300.000.000	130 ora ng	350.000.000	110 ora ng	300.000.000	130 ora ng	350.000.000	130 ora ng	400.000.000	130 ora ng	400.000.000
			3.26.05.2 .02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	90 ora ng	50 ora ng	50.000.000	80 ora ng	150.000.000	100 ora ng	200.000.000	80 ora ng	150.000.000	100 ora ng	200.000.000	100 ora ng	250.000.000	100 ora ng	250.000.000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
 Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

		3.26.05.2 .02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-			30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000
--	--	-----------------------	---	---	---	--	--	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain adalah :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN (4)	KET. (5)
1	Fasilitasi industri kreatif, program promosi produk lokal	Meningkatnya industri kreatif dan promosi produk lokal	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
2	Program Pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dan Berbasis Komunitas	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3	Peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana penunjang Pariwisata	Meningkatnya sarpras penunjang Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PD

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mojokerto sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, Indikator kinerja utama perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto antara lain adalah :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan	%	n/a	52%	55%	57%	60%	62%	
	Jumlah perolehan medali pada event olahraga	medali	n/a	100 medali	110 medali	120 medali	130 medali	140 medali	
	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	n/a	16%	17%	18%	19%	19%	
	Persentase peningkatan CB yang dilestarikan	%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase peningkatan kunjungan Wisatawan	%	45%	7%	8%	9%	10%	11%	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator selain indikator kinerja utama perangkat daerah yang mendukung langsung pencapaian kinerja visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029 dan dipergunakan sebagai keselerasan dengan indikator pada level Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto antara lain :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	TARGET TAHUN						KET. (10)
			2025 (4)	2026 (5)	2027 (6)	2028 (7)	2029 (8)	2030 (9)	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2,65%	3,70%	4,75%	5,80%	6,85%	7,90%	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	53%	56%	60%	63%	66%	70%	
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	90 medali	95 medali	100 medali	105 medali	110 medali	115 medali	
4	Terlestarikannya cagar budaya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
6	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Mojokerto	%	45%	47%	49%	51%	53%	55%	
7	Tingkat Hunian Akomodasi	%	46%	48%	50%	52%	54%	56%	
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,24%	2,44%	2,64%	2,84%	3,04%	3,24%	
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	

BAB V
PENUTUP**8.1. Kesimpulan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2029;
2. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata di wilayah Kabupaten Mojokerto, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Dokumen Renstra memuat perencanaan program kegiatan dan pagu anggaran yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Tahapan proses penyusunan ini melibatkan Bappeda Kabupaten Mojokerto sebagai mitra

yang membantu proses konsultasi dan pembentukan Foccus Group Discussion (FGD) dalam rangka mencari masukan dari kalangan akademisi dan instansi terkait lainnya. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan, sasaran yang hendak dicapai, serta arah kebijakan yang akan ditempuh bagi pengembangan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025–2029), agar visi pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Dalam perjalanannya Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto ini mengalami revisi sesuai amanat RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan masyarakat dan diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan urusan Kebudayaan, urusan Pariwisata, urusan Pemuda dan Olahraga. Adapun perubahan/revisi tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Disbudporapar beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Disbudporapar secara berkesinambungan sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Disbudporapar Kabupaten Mojokerto.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO

NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP.19810207 200501 1 006